

Kartu Prakerja sebagai Modal Sosial dalam Mendukung Mobilitas Vertikal Pekerja Informal

Maya Lestari¹

¹ Universitas Indonesia mayalestari2102@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Sep 10, 2026

Revised Sep 30, 2026

Accepted Sep 30, 2026

Published Sep 30, 2026

Kata Kunci:

Kartu Prakerja, Kesenjangan Digital, Mobilitas Vertikal, Modal Sosial, Pekerja Informal.

Keywords:

Digital Divide, Informal Workers, Kartu Prakerja, Social Capital, Vertical Social Mobility.

ABSTRAK

Di Indonesia, pekerja informal memegang dominasi dalam struktur perekonomian karena jumlahnya yang besar. Sektor ini umumnya menjadi ruang penyerapan bagi kelompok tenaga kerja dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang stabil. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, memperparah ketimpangan karena kelompok bawah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai respons terhadap masalah tersebut, pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja untuk memberikan pengembangan kompetensi kerja. Meskipun demikian, efektivitas program ini dalam menciptakan mobilitas vertikal masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana program dapat digunakan sebagai bentuk modal sosial yang mampu memperkuat potensi mobilitas vertikal dari perspektif pekerja informal, lewat pelatihan pendidikan informal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap pekerja informal yang menjadi penerima manfaat kartu Prakerja. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Program Kartu Prakerja belum optimal sebagai modal sosial pendorong mobilitas vertikal pekerja informal akibat hambatan struktural digitalisasi dan minimnya pendampingan lanjutan.

ABSTRACT

Informal workers constitute a significant share of Indonesia's labor force, particularly among groups with limited access to stable formal employment. The COVID-19 pandemic further intensified economic inequality, particularly for lower-income groups whose priority shifted toward meeting basic needs. In response, the Indonesian government introduced the Pre-Employment Card Program (Kartu Prakerja) to support workers' skill development. However, its effectiveness in facilitating upward social mobility remains contested. This study examines the extent to which the program functions as social capital that supports the potential for upward mobility among informal workers through non-formal education and

training. Using a qualitative case study approach, this research draws on in-depth interviews with informal workers who received benefits from the Kartu Prakerja program. The findings indicate that the program has not yet functioned optimally as social capital for promoting upward mobility among informal workers, largely due to structural barriers associated with digitalization and limited follow-up support.

Corresponding Author:

Name: Maya Lestari
Institution: Universitas Indonesia
Email: mayalestari2102@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Struktur ketenagakerjaan Indonesia ditandai oleh dominasi sektor informal. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa 59,40% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, sebuah proporsi yang kembali meningkat pada 2025. Kelompok ini mencakup buruh, pedagang kecil, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro. Secara global, informalitas merupakan bentuk kerja yang umum di negara berpendapatan rendah dan menengah, dan sebagian besar pekerjaannya tidak terjangkau perlindungan sosial formal (International Labour Organization, 2018). Informalitas bukan fenomena tunggal, sebagian pekerja memilihnya secara sukarela, tetapi sebagian besar terdorong ke sana karena terbatasnya kesempatan kerja formal (Maloney, 2004; Ulysees, 2020). Kondisi minimnya lapangan kerja formal inilah yang membuat sektor informal menjadi ruang penyerapan bagi tenaga kerja dengan keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap pekerjaan yang stabil.

Keterbatasan tersebut menempatkan pekerja informal pada posisi yang rentan. Pekerjaan informal umumnya tidak disertai kepastian pendapatan, jaminan kerja, maupun akses pelatihan yang memadai (Chen, 2012). Standing (2011) menyebut kelompok dengan karakteristik demikian sebagai precariat, yakni kelompok yang hidup dengan ketidakamanan kerja dan pendapatan yang kronis. Pada tingkat rumah tangga, kerentanan itu tampak dalam sempitnya ruang untuk menabung dan berinvestasi. Laporan Kompas menunjukkan bahwa rata-rata sisa pendapatan kelas menengah dalam satu bulan hanya sekitar Rp435.888 (Purwanto, 2024). Bila kelompok menengah saja demikian, ruang finansial pekerja informal kelas bawah untuk membiayai pengembangan diri dan pelatihan keterampilan tentu lebih sempit. Dengan demikian, kerentanan ini secara langsung mempersempit peluang mobilitas sosial dan ekonomi, sebab investasi pada keterampilan menuntut sumber daya yang justru paling langka bagi kelompok tersebut.

Pandemi COVID-19 pada 2020 memperparah situasi itu. Per 1 Mei 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1.722.958 pekerja sektor formal dan informal terdampak, dengan 314.833 orang di antaranya berasal dari sektor informal (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020). Kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba menempatkan pekerja dalam situasi krisis, dan pengeluaran untuk pelatihan keterampilan menjadi kebutuhan sekunder karena rumah tangga berfokus pada strategi bertahan hidup. Dalam situasi inilah dukungan negara menjadi sangat dibutuhkan.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Program ini semula dirancang sebagai program pelatihan berbasis pasar, tetapi karena peluncurannya bertepatan dengan krisis, desainnya bergeser menjadi skema semi-bantuan sosial yang memadukan transfer tunai dengan akses pelatihan digital (Muhyiddin et al., 2025). Dalam dua tahun pertama saja, lebih dari 23 juta orang mendaftar dan lebih dari 11 juta di antaranya terpilih melalui undian (Hanna et al., 2026). Antusiasme masyarakat tersebut menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai terobosan untuk memperluas kesempatan sosial. Dari sudut pandang sosiologis, Prakerja dapat dibaca sebagai bentuk redistribusi kesempatan yang ditujukan untuk memperkecil jarak antara kelas bawah dan menengah melalui penyediaan akses pelatihan, sertifikasi, dan insentif ekonomi. Pemerintah Singapura menempuh kebijakan sejenis melalui SkillsFuture, yang menyediakan akses pelatihan dan insentif agar warganya menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Meskipun demikian, efektivitas program ini dalam menciptakan mobilitas vertikal masih diperdebatkan. Secara umum, program pelatihan cenderung memberi dampak kecil dalam jangka pendek dan lebih besar pada jangka menengah hingga panjang, dengan variasi yang besar menurut kelompok sasaran (Card et al., 2018). Bukti mengenai Prakerja sendiri tidak seragam. Al Ayyubi et al. (2023) menemukan bahwa keikutsertaan pemuda meningkatkan partisipasi di pasar kerja, terutama di sektor informal, tetapi tidak berdampak signifikan pada pendapatan. Anggara dan Auwalin (2024) menemukan dampak negatif terhadap peluang mempertahankan pekerjaan pada peserta muda dan dampak positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan. Tasmilah (2023) melaporkan bahwa pelatihan Prakerja berpengaruh positif terhadap terbentuknya wirausaha baru pada generasi Z, tetapi tidak pada generasi Y dan X, dan hanya pada sektor jasa. Pada data survei nasional tidak ditemukan dampak rata-rata terhadap konsumsi, pekerjaan, maupun pendapatan, tetapi pada kelompok yang benar-benar menerima manfaat terdapat kenaikan kegiatan wirausaha dan pendapatan (Hanna et al., 2026).

Menurut Gary S. Becker (1964), teori human capital menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah bentuk investasi yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas seseorang. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pendidikan yang dimiliki, semakin besar peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (Becker, 1964). Program Kartu Prakerja dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat modal manusia melalui peningkatan keterampilan dan pemberian sertifikasi yang diakui secara formal. Sertifikat hanya bernilai ketika dapat menjadi sinyal kemampuan yang dipercaya pasar kerja (Spence, 1973), sementara dampak pelatihan juga bergantung pada desain dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kerja (Card et al., 2018). Teori ini menurut peneliti diperlukan untuk memberikan asumsi dasar dari program Prakerja dengan tujuan yang dimilikinya, yang kemudian apakah akan menghasilkan mobilitas ekonomi dalam pengalaman pekerja informal.

Menurut Bourdieu (1986), posisi sosial seseorang ditentukan oleh akumulasi berbagai bentuk modal—ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Dalam konteks ini, Kartu Prakerja berfungsi memperkuat modal sosial (melalui jaringan pelatihan dan komunitas) serta modal kultural (melalui sertifikasi dan keterampilan baru), yang dapat meningkatkan posisi sosial peserta di struktur masyarakat. Pemilihan teori modal Bourdieu menjadi penting sebab penelitian berfokus pada hasil pelatihan sekaligus juga pada proses akses terhadap program. Pemilihan teori ini juga menjadi pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian, mengenai Program Kartu Prakerja berfungsi sebagai modal sosial yang mendorong mobilitas vertikal pekerja informal. Jaringan dapat membuka akses terhadap informasi dan sumber daya (Coleman, 1988; Granovetter, 1973; Lin, 2001), tetapi sekaligus dapat mengecualikan mereka yang berada di luar jaringan tersebut (Portes, 1998). Burt (2004) juga menunjukkan bahwa individu yang menjadi penghubung antarjaringan dapat berperan sebagai broker. Konsep ini relevan untuk membaca praktik joki sebagai perantara yang menyediakan pengetahuan dan kemampuan teknis yang tidak dimiliki sebagian calon peserta.

Studi-studi sebelumnya yang meneliti tentang hal ini sebagian besar bersifat kuantitatif dan berfokus pada luaran pasar kerja. Kajian yang menelaah bagaimana pekerja informal mengakses program, dan mengonversinya menjadi sumber daya sosial-ekonomi, dengan kerangka sosiologis tentang modal, masih terbatas. Padahal, salah satu temuan penting evaluasi berskala besar adalah munculnya agen atau “joki” yang membantu, dan dalam sebagian kasus mengambil alih, proses pendaftaran (Hanna et al., 2026).

Penelitian ini menelaah sejauh mana program dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang memperkuat potensi mobilitas vertikal dari perspektif pekerja informal. Pertanyaan utama penelitian adalah: bagaimana Program Kartu Prakerja berfungsi sebagai modal sosial yang mendorong mobilitas vertikal pekerja informal di Indonesia? Pertanyaan ini dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan turunan: (1) bagaimana pekerja informal memaknai motivasi mengikuti program; (2) bagaimana peran jaringan sosial dalam akses terhadap program; dan (3) sejauh mana keterampilan dan insentif dari program terkonversi menjadi perubahan posisi kerja dan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pemahaman tentang makna dan pengalaman subjektif pekerja informal, yang sulit ditangkap melalui data survei. Kasus dibatasi pada pengalaman penerima Prakerja yang berada di Kota Pematang Siantar. Lokasi ini ditentukan oleh akses penulis terhadap informan, sehingga penelitian tidak mengklaim Pematang Siantar sebagai lokasi yang representatif.

Data primer diperoleh dari tiga informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif (Palinkas et al., 2015) dengan tiga kriteria: (a) pernah mengikuti Program Kartu Prakerja dan memahami mekanismenya; (b) memiliki latar belakang pekerjaan informal, atau pekerjaan formal yang rentan secara ekonomi sehingga beralih ke pekerjaan informal; dan (c) bersedia menceritakan pengalaman mengikuti pelatihan secara daring. Kriteria kedua sengaja dibuat longgar agar diperoleh variasi pengalaman dan sudut pandang, mencakup pedagang kecil maupun pekerja formal yang terdampak ketidakpastian kerja.

Perlu dicatat secara jujur bahwa dalam praktiknya sebagian informan diperoleh melalui *snowball sampling*, dengan rujukan berantai. Informan 1 dan Informan 3 sama-sama memperoleh informasi dan bantuan mengenai Prakerja dari Informan 2. Pola ini mendekati *snowball sampling* (Biernacki & Waldorf, 1981) dan membawa konsekuensi informan berasal dari jaringan sosial yang sama sehingga pengalaman mereka cenderung homogen (Noy, 2008). Konsekuensi ini dibahas kembali pada bagian keterbatasan karena berkaitan langsung dengan salah satu temuan utama, yaitu peran jaringan sosial. Jumlah tiga informan tidak dimaksudkan mencapai kejenuhan data (Guest et al., 2006). Penelitian ini bertumpu pada gagasan *information power* (Malterud et al., 2016): tujuan penelitian yang sempit, kerangka teoretis yang spesifik, dan dialog wawancara yang terarah memungkinkan sampel kecil menghasilkan wawasan analitis yang berguna, meskipun tidak representatif.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur secara daring dengan pertanyaan terbuka, karena adanya kendala jarak antara penulis dan informan. Wawancara daring dinilai layak untuk menggali pengalaman personal dengan catatan bahwa kedalaman interaksi dapat berbeda dari wawancara tatap muka (Deakin & Wakefield, 2014). Panduan wawancara memuat tujuh pokok pertanyaan (Lampiran 1) mengenai motivasi mengikuti program, persiapan yang dilakukan, keterampilan yang diperoleh, manfaat terhadap pekerjaan dan pendapatan, manfaat lain di luar keterampilan, hambatan selama pelatihan daring, serta penilaian efektivitas program dalam membantu mencari pekerjaan. Wawancara dilakukan melalui platform Zoom dengan durasi rata-rata 45 menit per informan. Wawancara berlangsung dalam bahasa Indonesia

yang bercampur bahasa Jawa; kutipan berbahasa Jawa diterjemahkan oleh penulis. Seluruh informan telah memberikan persetujuan dan identitas disamarkan menjadi Informan 1, 2, dan 3.

Data sekunder diperoleh dari laporan resmi pemerintah (Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan), peraturan perundang-undangan terkait Prakerja, serta artikel jurnal dan literatur akademik mengenai ketenagakerjaan, pelatihan kerja, dan sektor informal. Data sekunder digunakan untuk membingkai konteks kebijakan dan untuk mengonfrontasikan temuan lapangan dengan bukti dari penelitian lain.

Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) yang dikombinasikan dengan pengodean fleksibel deduktif-induktif (Deterding & Waters, 2021). Prosesnya berlangsung dalam lima tahap. Pertama, seluruh rekaman ditranskripsikan secara verbatim, lalu dibaca berulang untuk memahami konteks dan nuansa tuturan. Kedua, penulis melakukan pengodean awal. Kode deduktif diturunkan dari pokok pertanyaan wawancara dan konsep teoretis, sedangkan kode induktif dibiarkan muncul dari data. Ketiga, kode dikelompokkan ke dalam kategori analitis dan tema. Keempat, tema ditinjau ulang dengan membandingkan antarinforman, termasuk mencari kasus yang menyimpang dari pola umum (analisis kasus negatif). Kelima, penulis menafsirkan tema dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis, yakni teori human capital dan teori modal Bourdieu, serta pada hasil penelitian terdahulu.

Kredibilitas data diupayakan melalui triangulasi sumber, yakni wawancara dan data sekunder), perbandingan antarinforman, deskripsi kontekstual yang rinci agar pembaca dapat menilai keterterapan temuan (Lincoln & Guba, 1985), serta pencatatan jejak analisis (Nowell et al., 2017). Penulis melakukan konfirmasi hasil kepada informan. Penulis juga menyadari posisinya sebagai peneliti yang berjarak secara spasial dan kelas sosial-pendidikan dari informan, dan bahwa tingkat kedekatan yang tercermin dalam sebagian tuturan informan, misalnya sapaan yang santai, dapat memengaruhi keterbukaan mereka.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, jumlah informan terbatas sehingga temuan tidak dimaksudkan mewakili seluruh penerima Prakerja. Kedua, karena sebagian informan direkrut melalui rujukan berantai, temuan tentang pentingnya jaringan sosial sebagian dapat merupakan hasil dari pengambilan sampel; oleh karena itu temuan tersebut diperlakukan sebagai proposisi analitis yang dikuatkan oleh bukti eksternal, bukan sebagai generalisasi. Ketiga, seluruh informan adalah orang yang berhasil lolos dan menyelesaikan program (*survivorship*); suara mereka yang gagal mendaftar, menyerah di tengah jalan, atau tidak pernah tahu tentang program tidak terwakili. Keempat, data bersifat subjektif dan bergantung pada ingatan, sementara jarak waktu sejak pelatihan cukup lama, sebagaimana diakui informan sendiri yang “lupa” isi pelatihan. Kelima, sebagian jawaban cenderung normatif dan tidak disertai bukti konkret, sehingga rentan terhadap bias keinginan sosial. Keenam, wawancara daring membatasi kedalaman eksplorasi dan pengamatan nonverbal. Ketujuh, keterangan tentang praktik joki hanya berasal dari satu informan yang berperan sebagai penyedia jasa; perspektif klien joki tidak tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Verbatim Wawancara dengan Informan

Pertanyaan Pokok	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Bagaimana motivasi yang mendasari Anda mengikuti Program Kartu Prakerja?	"kegiatan aku berjualan keliling, alasan aku mendaftar prakerja karena ingin mendapatkan modal tambahan itu sih yang utama" dapat info program PraKerja	"karena kan program baru dari pemerintah jd penasaran pengen coba, yang kedua karna ada insentifnya"	"Alasan utama saya mengikuti progam kartu prakerja adalah untuk belajar pengembangan diri dan belajar usaha" dapat info dari informan 2

	dari informan 2.	dapat info dari teman"	
Apa sajakah yang perlu disiapkan oleh Anda dalam menyiapkan keikutsertaan Program Kartu Prakerja?	"tidak ada persiapan yang lebih sih cuma belajar memahami kelasnya aja, agar bisa mengerjakan semua soalnya jadi aku belajar dari sana" "insyaAllah sih waktu itu aman, aku di arahin sama [Informan 2] sekali terus langsung bisa mengikutinya. untuk pendaftaran gampang kok nggak ada kendala" "alhamdulillah sebelumnya nggak sering tapi pernah mengikuti belajar secara daring, sekarang aja masih belajar lewat online, oh yaa sekarang aku lagi belajar jadi penulis. hehe"	"Iyaa benar , dulu saya daftar di gelombang 15 baru lolos di gelombang 24 yang penting jangan menyerah. Dulu yg penting ada KK dan KTP, trus ada tes tes nya juga."	"awalnya juga saya mengalami kegagalan 3 kali saya tidak lolos , tapi saya tidak menyerah, di gelombang ke selanjutnya Alhamdulillah saya bisa lolos, untuk persiapan sebenarnya spontan aja si, saya lebih banyak belajar dari yg pernah ikut progam kartu prakerja"
Setelah mengikuti program Pra-Kerja, keterampilan apa yang Anda peroleh dan kembangkan?	"waaahh lupa aku udah agak lama banget yaa. tapi pelatihane mudah kok nggak susah semua bisa dipahami dengan baik asal kita jangan terburu buru aja" "haa enggak aku praktekin isinya sih keren bisa buat aku belajar mana aku lupa kan udah lama banget. kaya keterampilan sejenis pemasaran. karena aku waktu itu dagang jadi aku ambil kelas itu yang masih ada hubungannya kan"	"mengambil pelatihan 'menjadi konten kreator' lupa judul lengkapnya"	"banyak yg saya pelajari seperti pemasaran online"
Apakah pelatihan ini membantu Anda memperoleh pekerjaan atau meningkatkan pendapatan?	"menurut aku belum bisa untuk mencari pekerjaan tapi kalau untuk membantu membangun usaha dan branding diri itu sudah pasti. yang pasti kelas online nya banyak banget manfaat yang kita dapatkan dari sana apa saja yang kita mau sesuai kebutuhan kita di sana ada semua"	"Program prakerja membantu dalam mencari pekerjaan karna menambah keterampilan dan kemampuan"	"Iya sesuai pekerjaan saat ini, banyak yg saya pelajari seperti pemasaran online. Menurut saya progam kartu prakerja sangat membantu untuk mencari pekerjaan" "Btw mas alumni Joki prakerja wkwk. Wktu kae dibelari [Informan 2], Alhamdulillah bien dwete akeh tp saiki ora wkwk. Keliling kampung nawari kokui. Saiki gelombange ws ra buka, soale kan ws ganti presiden, pak jokowi kartu prakerja, pak prabowo makan bergizi gratis, progame pak jokowi ra dilanjutke."
Setelah mengikuti keterampilan ini,	"yang pasti dapat wawasan baru soal pemasaran"	"Bagian yang bermanfaat dari"	"meningkatkan wawasan dan tentunya insentif"

apa sajakah yang Anda dapatkan selain keterampilan kerja?	bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar dagangan kita tetap diminati dan bisa bertahan lama" "iyah bener dapet insentif, tapi waktu itu insentif kakak nggak kaka ambil . malah kaka kasihkan ke temen kaka"	prakerja adalah menambah wawasan Manfaat yang saya dapat selain keterampilan adalah menambah ilmu."	
Hambatan apa yang Anda hadapi dalam mengikuti pelatihan daring?	"alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali tergantung perorangan nya sih menurut aku"	"Tidak ada kendalaa"	"Iya pelatihan terlalu lama"
Sejauh mana Anda menilai program kerja ini efektif membantu mencari pekerjaan?	"menurut aku belum bisa untuk mencari pekerjaan tapi kalau untuk membantu membangun usaha dan branding diri itu sudah pasti	"Program prakerjaa membantu dalam mencari pekerjaan karna menambah keterampilan dan kemampuan .."	"Menurut saya progam kartu prakerja sangat membantu untuk mencari pekerjaan"

(Sumber: Data Diolah Penulis, 2026)

3.1. Prakerja sebagai Bantuan Ekonomi

Program Kartu Prakerja, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, dirancang untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengembangkan kewirausahaan. Logika yang mendasarinya sejalan dengan teori human capital (Becker, 1964), pelatihan meningkatkan kapasitas tenaga kerja, yang kemudian memperbaiki posisi ekonomi seseorang. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam pengalaman pekerja informal, urutan makna itu terbalik. Program lebih dulu dipahami sebagai bantuan ekonomi dan peluang memperoleh uang tambahan, baru kemudian sebagai sarana belajar.

Hal ini paling jelas tampak pada motivasi awal informan. Informan 1, yang sehari-hari berjualan keliling, menyatakan:

"Kegiatan aku berjualan keliling, alasan aku mendaftar prakerja karena ingin mendapatkan modal tambahan itu sih yang utama." (Informan 1)

Informan 2 dan 3 juga menyebut insentif sebagai alasan penting, meskipun disertai keinginan belajar. Informan 2, misalnya, menyebut rasa penasaran terhadap program baru dari pemerintah sebagai alasan pertama dan insentif sebagai alasan kedua, sedangkan Informan 3 menyebut belajar pengembangan diri dan usaha sebagai alasan utama, tetapi pada bagian lain wawancara menyebut *"meningkatkan wawasan dan tentunya insentif"* sebagai manfaat yang diperoleh. Motivasi karenanya berlapis. Analisis penulis: temuan ini menunjukkan bahwa bagi pekerja informal, Prakerja hadir dalam situasi kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga pelatihan bukan tujuan awal, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup. Tiga informan konsisten berangkat dari kondisi ekonomi yang rentan.

Pembacaan ini sejalan dengan riwayat kebijakan program. Muhyiddin et al. (2025) mencatat bahwa pada 2020–2022 Prakerja beroperasi dengan orientasi respons krisis yang memadukan transfer tunai dan pelatihan digital, dan baru kemudian bergerak kembali ke peran sebagai instrumen aktivasi pasar kerja. Hanna et al. (2026) menambahkan bahwa desain awal yang berorientasi pelatihan disusun ulang sehingga sekitar 70% bantuan berbentuk tunai dan sekitar 30% berupa *voucher* pelatihan. Dengan komposisi tersebut, wajar apabila peserta menempatkan insentif di garis depan.

Indikasi ambiguitas ini juga terlihat dari cara informan menggunakan insentif. Salah seorang informan menuturkan bahwa insentif yang diterimanya tidak ia gunakan sendiri, tetapi justru

diberikan kepada temannya. Hal ini menunjukkan bahwa insentif tidak selalu digunakan untuk pengembangan diri atau usaha penerimanya, tetapi juga dapat berpindah melalui hubungan pertemanan. Namun, temuan ini tetap perlu dibaca dengan hati-hati karena alasan yang disampaikan informan diberikan setelah kejadian dan bisa saja dipengaruhi keinginan untuk terlihat sebagai peserta yang “ingin belajar”. Meski begitu, dominannya alasan ekonomi dalam data justru membuat temuan ini lebih masuk akal, karena jawaban tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran peserta yang mengikuti program terutama untuk belajar atau mengembangkan diri.

3.2. Jaringan Sosial sebagai Akses Terhadap Program

Temuan berikutnya adalah bahwa akses terhadap Prakerja sangat bergantung pada jaringan sosial. Tidak seorang pun informan mengetahui dan mengikuti program secara mandiri atau melalui sosialisasi pemerintah. Informasi diperoleh dari teman atau kenalan. Informan 1 dan Informan 3 sama-sama memperoleh informasi dan bantuan dari Informan 2, sementara Informan 2 sendiri mengaku mendapat informasi dari teman.

Pengalaman kegagalan berulang memperjelas peran jaringan. Informan 2 mengaku mendaftar sejak gelombang 15 dan baru lolos pada gelombang 24, dengan persyaratan administratif berupa Kartu Keluarga, KTP, dan tes. Informan 3 mengalami hal serupa:

“Awalnya juga saya mengalami kegagalan 3 kali saya tidak lolos, tapi saya tidak menyerah.” (Informan 3)

Akan tetapi, Informan 3 juga menjelaskan bahwa ketekunan itu tidak berdiri sendiri; ia banyak belajar dari orang yang lebih dahulu mengikuti program. Analisis penulis: pengetahuan tentang cara lolos, seperti waktu mendaftar, cara mengerjakan tes, dan cara menyiasati kendala teknis, merupakan pengetahuan praktis yang beredar melalui hubungan personal, bukan melalui kanal resmi. Dalam istilah Bourdieu (1986), jaringan ini adalah sumber daya potensial yang dimobilisasi untuk memperoleh keuntungan; dalam istilah Coleman (1988), hubungan sosial menyediakan informasi yang membuat investasi modal manusia dapat dijalankan. Kemampuan individu saja tidak cukup; mereka yang memiliki jaringan yang kuat cenderung lebih mudah mengakses program.

Dari sudut pembedaan Putnam (2000) dan Woolcock (1998), jaringan yang tampak dalam data adalah modal sosial yang mengikat: hubungan antarteman dan kenalan dalam lingkungan sosial yang serupa. Yang nyaris tidak tampak adalah modal sosial penghubung, yaitu relasi antara warga dan lembaga negara yang menyalurkan informasi dan pendampingan. Negara nyaris absen sebagai sumber informasi dan bantuan dalam rantai akses yang dituturkan informan. Program yang dirancang sebagai instrumen negara pada akhirnya justru “dijalankan” oleh jaringan non-negara.

Terdapat satu paradoks yang perlu ditelaah kritis. Ketika ditanya tentang hambatan mengikuti pelatihan daring, Informan 1 menjawab bahwa tidak ada kendala sama sekali dan menambahkan bahwa hal itu “tergantung perorangannya”, Informan 2 menjawab tidak ada kendala, dan hanya Informan 3 yang menyebut pelatihan terlalu lama. Sekilas, jawaban ini bertentangan dengan argumen tentang kesenjangan digital. Penulis menafsirkan ketiadaan hambatan yang dilaporkan sebagai hasil dari dua hal. Pertama, hambatan tersebut tidak terlihat karena telah “diserap” oleh bantuan jaringan; Informan 2 menyatakan bahwa ia diarahkan seseorang sekali lalu langsung bisa mengikuti dan mengaku pendaftaran mudah, sedangkan informan lain diarahkan oleh Informan 2. Kedua, sampel hanya memuat mereka yang berhasil, sehingga mereka yang tersingkir oleh hambatan tidak hadir dalam data. Frasa “tergantung perorangannya” juga menarik secara sosiologis, karena menginternalisasi keberhasilan dan kegagalan sebagai urusan individu, padahal data menunjukkan peran struktur jaringan. Program yang mensyaratkan kemampuan digital dan administratif menjadi tidak sepenuhnya inklusif; temuan ini sejalan dengan literatur kesenjangan digital tingkat kedua (Hargittai, 2002; Scheerder et al., 2017) dan dengan temuan evaluasi skala besar bahwa penerima yang lebih tua, lebih pedesaan, kurang berpendidikan, dan

kurang menggunakan internet lebih mungkin mengalami masalah pada proses pendaftaran daring (Hanna et al., 2026).

Dalam kerangka keuntungan kumulatif (Merton, 1968; DiPrete & Eirich, 2006), situasi ini menghasilkan efek yang bersifat Matthew. Prakerja, yang dimaksudkan meningkatkan kapasitas, lebih mudah diakses oleh mereka yang sejak awal telah memiliki modal sosial dan kecakapan digital. Sementara itu, pekerja informal yang lebih rentan, yang tidak memiliki jaringan atau kemampuan digital, berpotensi tertinggal atau tersisih dari manfaat program.

3.3. Joki Prakerja

Temuan yang tidak diantisipasi dalam panduan wawancara adalah pengakuan Informan 3 bahwa ia pernah menjadi joki Prakerja untuk memperoleh penghasilan tambahan. Ia menerapkan skema pembagian insentif yang diperoleh pada akhir pelatihan dengan besaran sesuai kesepakatan bersama. Ia juga menuturkan bahwa keterampilan ini ia pelajari dari Informan 2. Dalam tuturan berbahasa Jawa ia menyebut dirinya "*alumni joki prakerja*", bahwa dahulu "*uangnya banyak*" tetapi kini tidak lagi, serta bahwa ia berkeliling kampung menawarkan jasa tersebut. Ia menambahkan bahwa gelombang pendaftaran sudah tidak dibuka lagi karena pergantian presiden, sehingga program masa pemerintahan sebelumnya dinilai tidak dilanjutkan. Catatan penulis: klaim mengenai keberlanjutan program merupakan persepsi informan dan perlu dibedakan dari status kebijakan resmi. Persepsi itu sendiri informatif karena memperlihatkan bahwa bagi peserta di lapisan bawah, kesinambungan program dipersepsikan bergantung pada figur politik, bukan pada institusi.

Fenomena ini dapat dibaca melalui tiga lensa. Pertama, sebagai strategi adaptif. Alih-alih dipahami semata sebagai kecurangan, joki dapat dilihat sebagai respons pekerja informal terhadap sistem pelatihan daring yang tidak ramah bagi pemula dan mereka yang tidak akrab dengan teknologi. Dalam kerangka Merton (1938), praktik ini menyerupai adaptasi *innovation*, tujuan yang dilembagakan (memperoleh manfaat ekonomi) tetap diterima, tetapi sarana yang tersedia dinilai tidak memadai sehingga ditempuh sarana alternatif. Kedua, sebagai brokerase. Joki menempati celah struktural antara sistem digital dan calon peserta yang tidak mampu mengoperasikannya (Burt, 2004); modal sosial dimobilisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebagaimana dirumuskan Bourdieu (1986), dan dalam hal ini digunakan untuk menutupi kekurangan modal manusia di pihak klien. Dengan demikian, joki Prakerja merupakan bentuk ekstrem dari mobilisasi modal sosial sekaligus indikator ketiadaan pendampingan yang setara dari negara. Ketiga, sebagai persoalan integritas dan perlindungan peserta. Penulis tidak bermaksud meromantisasi praktik ini. Evaluasi terbaru menemukan bahwa sekitar 30% penerima yang tercatat dalam data administrasi mengaku menerima program dalam survei rumah tangga nasional, dan bahwa penerima yang melaporkan tidak menerimanya cenderung lebih tua, lebih pedesaan, kurang berpendidikan, dan kurang menggunakan internet (Hanna et al., 2026). Peneliti tersebut menduga kemudahan sistem daring dan pembayaran melalui dompet elektronik memfasilitasi kemunculan agen, dan dalam sebagian kasus agen memotong biaya atau tidak memberi tahu peserta bahwa mereka lolos. Hasil tersebut mengingatkan bahwa relasi joki dapat merugikan pihak yang paling rentan, termasuk berisiko terhadap data identitas dan hak atas insentif.

Dalam data penelitian ini, relasi antara joki dan kliennya tampak sebagai kesepakatan bagi hasil, tetapi perspektif klien tidak tersedia, sehingga penulis tidak dapat menilai apakah kesepakatan itu setara. Ketimpangan informasi dan kuasa antara pihak yang paham sistem dan pihak yang tidak paham merupakan alasan mengapa penafsiran joki hanya sebagai strategi adaptif akan terlalu sepihak. Pengurangan penghasilan joki yang dituturkan Informan 3 konsisten dengan ketatnya verifikasi dan berkurangnya gelombang, meskipun penulis tidak dapat menetapkan hubungan kausal dari satu kasus. Fenomena joki karenanya tepat dijadikan bahan evaluasi desain program, bukan sekadar dianggap pelanggaran peserta.

3.4. Batas Mobilitas Vertikal

Pertanyaan turunan ketiga menyoroti apa yang sebenarnya diperoleh peserta dan sejauh mana hal itu berubah menjadi perbaikan posisi kerja. Informan menyebutkan manfaat berupa wawasan baru, terutama dalam bidang pemasaran, misalnya cara mempertahankan pelanggan agar dagangan tetap diminati, serta pelatihan konten kreator dan pemasaran daring. Sebagian informan mengaku telah banyak lupa isi pelatihan karena jarak waktu yang jauh, dan ada yang mengakui tidak mempraktikkannya. Dalam istilah Bourdieu (1986), manfaat yang dituturkan lebih dekat pada modal kultural terinkorporasi (wawasan dan pengetahuan) daripada modal kultural terlembagakan yang bernilai di pasar kerja; tidak satu pun informan menyebutkan menggunakan sertifikat Prakerja untuk melamar pekerjaan atau meyakinkan pihak lain. Ini menguatkan catatan teoretis bahwa nilai sertifikat bergantung pada kepercayaan pemberi kerja terhadapnya sebagai sinyal (Spence, 1973).

Penilaian informan terhadap efektivitas program tampak ambigu. Informan 2 menyatakan, *"Program prakerja membantu dalam mencari pekerjaan,"* dan Informan 3 menyatakan, *"Sangat membantu untuk mencari pekerjaan."* Keduanya tidak menjelaskan lebih lanjut dari segi apa program membantu mencari pekerjaan. Penulis meragukan jawaban tersebut karena masih terdapat kecenderungan menjawab secara normatif tanpa bukti konkret mengenai perubahan posisi kerja. Sebaliknya, Informan 1 memberikan jawaban yang lebih spesifik:

"Menurut aku belum bisa untuk mencari pekerjaan tapi kalau untuk membantu membangun usaha dan branding diri itu sudah pasti." (Informan 1)

Tidak satu pun informan menunjukkan mobilitas vertikal yang signifikan, seperti transisi ke pekerjaan formal yang stabil. Jika mobilitas dipahami menurut tiga indikator pada bagian 2.1, data hanya menunjukkan indikasi terbatas pada indikator kedua dan ketiga, itu pun bersifat klaim subjektif dan terutama pada usaha mikro. Pola ini sejalan dengan bukti kuantitatif, keikutsertaan Prakerja dikaitkan dengan meningkatnya partisipasi di sektor informal tanpa dampak pendapatan yang signifikan (Al Ayyubi et al., 2023), dengan dampak yang tidak signifikan terhadap pendapatan dan berkurangnya peluang mempertahankan pekerjaan pada peserta muda (Anggara & Auwalin, 2024), dan dengan efek yang terbatas pada wirausaha baru pada kelompok dan sektor tertentu (Tasmilah, 2023). Penerima yang benar-benar memperoleh program mengalami peningkatan kegiatan wirausaha sekitar 19% tanpa perubahan pada total pekerjaan, yang menunjukkan pergeseran jenis pekerjaan, bukan penambahan lapangan kerja (Hanna et al., 2026). Dengan kata lain, apa yang tampak dalam data penelitian ini, yaitu penguatan usaha mikro dan branding diri, lebih tepat disebut peningkatan dalam sektor informal (mobilitas horizontal atau penguatan kapasitas bertahan) daripada mobilitas vertikal menuju posisi kelas yang lebih tinggi.

Card et al. (2018) mengingatkan bahwa dampak pelatihan sering baru terlihat dalam jangka menengah, sehingga ketiadaan mobilitas pada pengamatan ini tidak serta-merta berarti program gagal secara permanen. Al Ayyubi et al. (2023) sendiri menduga adanya efek pendapatan yang tertunda. Sebab tiga informan tidak mewakili populasi, temuan ini menunjukkan kemungkinan mekanisme, bukan besaran dampak.

Menggabungkan temuan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Prakerja lebih tepat dipahami sebagai sumber daya yang memperkuat kapasitas bertahan dalam jangka pendek daripada sebagai motor utama mobilitas kelas vertikal. Penelitian ini menemukan bahwa akses terhadap Prakerja sendiri mensyaratkan modal sosial. Hal ini menghasilkan situasi yang paradoks. Program yang dirancang sebagai alat peningkatan kapasitas justru lebih mudah diakses oleh mereka yang telah memiliki modal sosial sejak awal. Prakerja belum sepenuhnya berfungsi sebagai modal sosial yang dibangun oleh negara. Program ini masih bergantung pada modal sosial yang sudah dimiliki peserta.

Dengan demikian, program tampaknya tidak menghasilkan modal sosial baru, tetapi mengonsumsi modal sosial yang telah ada. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peningkatan

keterampilan tidak otomatis menghasilkan mobilitas vertikal. Sebaliknya, modal sosial menjadi prasyarat agar individu dapat mengakses pelatihan dan memanfaatkan hasilnya. Dengan kata lain, human capital dalam Prakerja baru bekerja ketika modal sosial telah tersedia. Konsisten dengan Bourdieu (1986), konversi antarbentuk modal tidak berlangsung cuma-cuma dan bergantung pada modal lain yang dimiliki.

3.5. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan dapat mengikuti Prakerja bukan karena telah siap secara literasi digital, melainkan karena dibantu jaringan sosial yang lebih memahami sistem. Karena pendampingan itu bersifat informal, hanya peserta yang memiliki koneksi yang diuntungkan. Implikasi berikut diajukan sebagai rekomendasi yang bersumber dari temuan eksploratif dan perlu diuji lebih lanjut sebelum diadopsi.

Pertama, jadikan pendampingan resmi sebagai bagian dari desain program. Pemerintah dapat menempatkan fasilitator Prakerja tingkat desa/kelurahan bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan atau pendamping UMKM, yang bertugas membantu pendaftaran, pemilihan pelatihan, dan pendampingan selama pelatihan daring. Skema ini serupa dengan pendamping Program Keluarga Harapan, tetapi difokuskan pada literasi digital dan pelatihan kerja. Rekomendasi ini selaras dengan literatur yang menekankan bahwa kesenjangan digital tingkat kedua hanya dapat dijembatani dengan dukungan keterampilan, bukan sekadar ketersediaan platform (Scheerder et al., 2017; van Dijk, 2005), dan dengan gagasan bahwa negara perlu membangun modal sosial penghubung bagi kelompok yang tidak memiliki jaringan (Woolcock, 1998).

Kedua, sederhanakan proses dan sediakan jalur luring terbatas, dengan verifikasi yang proporsional. Pendaftaran dan pelatihan daring perlu disederhanakan agar ramah bagi masyarakat berliterasi digital rendah, misalnya melalui pendaftaran luring terbatas di kantor desa atau balai latihan kerja. Praktik joki harus dijadikan bahan evaluasi, bukan hanya pelanggaran. Pada saat yang sama, perluasan akses harus disertai verifikasi identitas yang memadai, karena temuan eksperimental menunjukkan adanya kompromi antara fleksibilitas akses dan integritas penyaluran (Hanna et al., 2026). Pendampingan resmi di poin pertama dapat menjadi cara untuk menurunkan kebutuhan akan perantara tidak resmi tanpa melonggarkan verifikasi.

Ketiga, hubungkan pelatihan dengan kebutuhan kerja nyata dan jalur lanjutan. Banyak pelatihan hanya menambah wawasan tanpa pendampingan lanjutan. Bukti dari evaluasi program pelatihan menunjukkan bahwa dampak bergantung pada relevansi dan desain program (Attanasio et al., 2011; Card et al., 2018). Muhyiddin et al. (2025) juga merekomendasikan perbaikan desain program, penguatan infrastruktur digital, dan evaluasi berkelanjutan. Strategi welfare-to-work perlu memperkuat layanan pendukung yang mengintegrasikan pelatihan dengan kebutuhan kerja riil.

Keempat, tinjau ulang fungsi insentif. Insentif yang menjadi motivasi utama berisiko membuat program tidak mencapai tujuan pengembangan kompetensi. Insentif dapat dikaitkan dengan rencana usaha sederhana, misalnya proposal usaha mikro, yang kemudian menjadi syarat akses ke program lanjutan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pelatihan UMKM tingkat lanjut, sehingga insentif tidak hanya membantu sementara tetapi mendukung perubahan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Gagasan ini merupakan usulan penulis yang belum diuji dan perlu dikaji kelayakannya, termasuk risiko bahwa syarat tambahan justru menyulitkan kelompok yang paling rentan. Tanpa perubahan-perubahan ini, Prakerja berisiko hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki akses informasi dan jaringan sosial.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah bagaimana Program Kartu Prakerja berfungsi sebagai modal sosial yang mendorong mobilitas vertikal pekerja informal. Jawabannya bersifat bersyarat. Pertama, bagi pekerja informal, Prakerja lebih dahulu dimaknai sebagai bantuan ekonomi dan strategi bertahan hidup, baru kemudian sebagai sarana belajar. Kedua, akses terhadap program bergantung pada jaringan sosial yang sudah ada, sehingga modal sosial menjadi prasyarat, bukan hasil program. Ketiga, praktik joki menyingkap celah pendampingan dalam desain program sekaligus persoalan integritas yang perlu ditangani seimbang. Keempat, tidak ada informan yang menunjukkan mobilitas vertikal yang signifikan. Manfaat yang tampak berupa wawasan dan penguatan usaha mikro. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan *human capital* tidak otomatis mampu menjadi mobilitas vertikal ketika syarat konversinya, yakni modal sosial dan kapasitas digital, tidak merata.

Temuan ini terbatas pada tiga informan yang seluruhnya berhasil mengikuti program dan sebagian direkrut melalui jaringan yang sama. Penelitian selanjutnya perlu (1) melibatkan lebih banyak informan di lokasi yang beragam; (2) mewawancarai pendaftar yang gagal, peserta yang berhenti, dan bukan peserta; (3) menelaah perspektif klien joki dan pendamping; serta (4) memadukan wawancara dengan data administrasi atau survei dalam desain metode campuran, sehingga mekanisme yang diusulkan di sini dapat diuji secara lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayyubi, M. S., Pratomo, D. S., & Prasetyia, F. (2023). Does pre-employment card program improve Indonesian youth labor market performance in pandemic era? *Cogent Economics & Finance*, 11(2), Artikel 2267752. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267752>
- Anggara, R. T., & Auwalin, I. (2024). Optimizing the Program Kartu Prakerja for young workers. *Economics Development Analysis Journal*, 13(2), 168–178. <https://doi.org/10.15294/edaj.v13i2.78970>
- Attanasio, O., Kugler, A., & Meghir, C. (2011). Subsidizing vocational training for disadvantaged youth in Colombia: Evidence from a randomized trial. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(3), 188–220. <https://doi.org/10.1257/app.3.3.188>
- Badan Pusat Statistik. (2025, 5 Mei). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/keadaan-ketenagakerjaan-indonesia-februari-2025.html>
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Biernacki, P., & Waldorf, D. (1981). Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral sampling. *Sociological Methods & Research*, 10(2), 141–163. <https://doi.org/10.1177/004912418101000205>
- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member checking: A tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811. <https://doi.org/10.1177/1049732316654870>
- Blau, P. M., & Duncan, O. D. (1967). *The American occupational structure*. Wiley.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (hlm. 241–258). Greenwood Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Burt, R. S. (2004). Structural holes and good ideas. *American Journal of Sociology*, 110(2), 349–399. <https://doi.org/10.1086/421787>
- Card, D., Kluve, J., & Weber, A. (2018). What works? A meta analysis of recent active labor market program evaluations. *Journal of the European Economic Association*, 16(3), 894–931. <https://doi.org/10.1093/jeaa/jvx028>
- Chen, M. A. (2012). The informal economy: Definitions, theories and policies (WIEGO Working Paper No. 1). WIEGO. https://www.wiego.org/wp-content/uploads/2019/09/Chen_WIEGO_WP1.pdf
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Suppl.), S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>

- Deakin, H., & Wakefield, K. (2014). Skype interviewing: Reflections of two PhD researchers. *Qualitative Research*, 14(5), 603–616. <https://doi.org/10.1177/1468794113488126>
- Deterding, N. M., & Waters, M. C. (2021). Flexible coding of in-depth interviews: A twenty-first-century approach. *Sociological Methods & Research*, 50(2), 708–739. <https://doi.org/10.1177/0049124118799377>
- DiPrete, T. A., & Eirich, G. M. (2006). Cumulative advantage as a mechanism for inequality: A review of theoretical and empirical developments. *Annual Review of Sociology*, 32, 271–297. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123127>
- Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380. <https://doi.org/10.1086/225469>
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Hanna, R., Olken, B. A., Sumarto, S., Maulana, A., Alatas, V., & Satriawan, E. (2026, 19 Mei). How to design safety nets: Balancing accessibility and integrity. *VoxDev*. <https://voxdev.org/topic/social-protection/how-design-safety-nets-balancing-accessibility-and-integrity>
- Hanna, R., Olken, B. A., Sumarto, S., Maulana, A., Alatas, V., & Satriawan, E. (in press). On-demand assistance: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20250324>
- Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. *First Monday*, 7(4). <https://doi.org/10.5210/fm.v7i4.942>
- Helsper, E. J. (2012). A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. *Communication Theory*, 22(4), 403–426. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2012.01416.x>
- International Labour Organization. (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.). <https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/book/Women-and-men-in-the-informal/995219205402676>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). Data tenaga kerja terdampak COVID-19 per 1 Mei 2020. <https://katadata.co.id/berita/nasional/5eac433e92ae0/kemenaker-14-juta-pekerja-formal-kena-phk-dan-dirumahkan-saat-corona>
- Lin, N. (2001). *Social capital: A theory of social structure and action*. Cambridge University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. *World Development*, 32(7), 1159–1178. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.12.009>
- Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760. <https://doi.org/10.1177/1049732315617444>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. *Science*, 159(3810), 56–63. <https://doi.org/10.1126/science.159.3810.56>
- Muhyiddin, Wijaya, A. F., Putra, F., & Wike. (2025). Active labor market policy in Indonesia: Challenges of the Pre-Employment Card, Wage Subsidy, and Job Loss Insurance programs. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 9(2), 221–239. <https://doi.org/10.36574/jpp.v9i2.695>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), Artikel 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Noy, C. (2008). Sampling knowledge: The hermeneutics of snowball sampling in qualitative research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(4), 327–344. <https://doi.org/10.1080/13645570701401305>
- Oteng, S. A., Manful, E., & Nkansah, J. O. (2024). Digital literacy in the informal economy of Ghana: Life-long learning and extending working lives of older persons in post-COVID-19 era. *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 39(4), 375–395. <https://doi.org/10.1007/s10823-024-09514-9>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. (2020).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/36TAHUN2020PERPRES.pdf>
- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1>
- Purwanto, A. (2024, 28 Februari). Mengenal wajah kelas menengah Indonesia. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/artikel/mengenal-wajah-kelas-menengah-indonesia>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Scheerder, A., van Deursen, A., & van Dijk, J. (2017). Determinants of Internet skills, uses and outcomes: A systematic review of the second- and third-level digital divide. *Telematics and Informatics*, 34(8), 1607–1624. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.007>
- Sorokin, P. A. (1927). *Social mobility*. Harper & Brothers.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- Tasmilah. (2023). Pengaruh Kartu Prakerja dalam menciptakan wirausaha baru pada generasi Y dan Z. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 89–107. <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/download/237/78/1636>
- Ulysees, G. (2020). Informality: Causes and consequences for development. *Annual Review of Economics*, 12, 525–546. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082019-031419>
- van Dijk, J. (2005). *The deepening divide: Inequality in the information society*. Sage.
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27(2), 151–208. <https://doi.org/10.1023/A:1006884930135>
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.